

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

A. Buku

- Ali, Achmad. 2015. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Keadilan (Judicialprudence)*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Arrasjid, Chainur. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budhiartha. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang. Stara Press.
- Adjie, Habib. 2009. *Hukum Notaris Di Indonesia*. Bandung. PT. Refika Adiatama.
- Adjie, Habib dan Muhammad Hafidh. 2015. *Yayasan. Memahami Pendirian Perubahan Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. Surabaya-Semarang. PT Citraaditya Bakti.
- Chatamarassjid. 2000. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung. PT. Citra Aditya Bhakti.
- Harsono, Boedi. 2000. *Beberapa Analisa Tentang Hukum Agraria, Bagian I*. Jakarta. EsaStudy Club.
- Harsono, Budi. 2003. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan*. Jakarta. Djambatan.
- Harsono, Budi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta. Djambatan.
- HS, H. Salim. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.
- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta. Badan Hukum yayasan Obor Indonesia.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pokok-pokok Badan Hukum*. Jakarta. Sinar Harapan.

- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta. Erlangga.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung. PT. Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ke-6*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Muchsin dan Fadillah Putra. 2015. *Hukum Dan Kebijakan Publik: Analisis Atas Praktek Hukum Dan Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Sektor Perekonomian Di Indonesia*. Surabaya. Universitas Sunan Giri Surabaya.
- Muhamad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Hukum Acara Perdata, Edisi Keenam*. Yogyakarta. Liberty.
- Naja, Daeng. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Purwaningsih, Endang. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Mandar Maju.
- Radbruch, Gustav. 2012. *Tujuan Hukum*. (Sidharta, Terjemahan). Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Saleh, K. Wanjik. 2000. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Santoso, Urip. 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan. R. 2001. *Hukum Perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ke-3*. Jakarta. Universitas Indonesia (UI-Press).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penatausahaan Naskah Dinas dan Pengelolaan Arsip di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Adhani, Yuni Aditya. 2022. Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Kelalaian Dalam Hal Pembuatan Akta Jual Beli Yang Sertifikat Asli Hak Atas Tanahnya Tidak Diserahkan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 PK/PDT/2017). *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara*. <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/201>.
- Agustha, Joshua. 2017. *Inkonsistensi Pengaturan Modal Dasar Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Terhadap Tujuan Kepastian Hukum*. Yogyakarta. (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya). <https://e-journal.uajy.ac.id/14188/>.
- Amborowati, Yulia. 2020. Kekuatan Hukum Perjanjian Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah dan Bangunan yang Belum Terdaftar. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 18, No. 1, April 2020. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/3752>.
- Andriyanto, Roni, Dhody Ananta Rivandi W dan Ismail. 2022. Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol, *JOURNAL OF LEGAL RESEARCH*, Vol. 4 Issue. 5. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28921>.

- Anggraini, Siti. 2021. *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Peralihan Aset Yayasan Rumah Sakit Menjadi Aset Perseroan Terbatas (PT) Rumah Sakit*. Semarang. (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, 2021). <https://repository.unissula.ac.id/22585/>.
- Arrivillaga, Lucas R. 2014. The Swiss Legal Framework on Foundations and Its Principles About Transparency. *International Journal of Not-for-Profit Law*, Vol. 16, no.1, September 2014. https://www.icnl.org/wp-content/uploads/ijnl_swiss-legal-framework.pdf.
- Benalda, Katya, Muhamad Amirulloh dan Pupung Faisal. 2024. Penguatan Regulasi Rahasia Dagang Melalui Ketentuan Mengenai Perlindungan Informasi Rahasia Dalam Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Berdasarkan Penerapan Asas Kepastian Hukum, Teori Prospek Dan Teori Risiko”, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Volume 7, Nomor 2, Juni 2024. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1708>.
- Dewi, Ni Luh Juni Wira Astuti, I Gede Surata dan Ni Ny. Mariadi. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Klien Yang Protokolnya Dialihkan Kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah Lain (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng), Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 10, No. 1 Agustus 2022. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/1037/786>.
- Endriana, Muchamad Satria dan Widhi Handoko. 2022. Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Jual Beli Tanah Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Batang. *Notarius*, Volume. 15 Nomor. 1, April 2022. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46035>.
- Gidete, Dio Bintang dan Harsanto Nursadi. 2024. Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Milik Ganda Yang Dilakukan Oleh Badan Pertanahan Nasional”, *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Volume 15 Nomor 1, Januari 2024. <https://jurnalhost.com/index.php/jhpm/article/download/479/546/1564>.
- Ifitah, Addien. 2014. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah. *Lex Privatum Vol. II, No. 3, Agustus-Oktober 2014*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6158/5684>.

- Immanuela, Chrisya Nadine dan Siti Hajati Hoesin. 2022. Akibat Hukum Terhadap Notaris/Ppat Terkait Perbuatan Melawan Hukum oleh Pegawai Notaris/Ppat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt. G/2020/PN Blt). *PALAR (Pakuan Law review)*, Volume, 8 No. 1, Januari-Juni 2022. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4584>.
- Lestario, Arie dan Erlina. 2022. Sistem Pendaftaran Tanah yang memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah di Indonesia. *Notary Law Journal Vol 1 Issue 1 January 2022*. <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>.
- Lunandi, Yenny Yuniawaty dan Arman Tjoneng. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Klien Akibat Tidak Diketahuinya Keberadaan Protokol Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang Meninggal Dunia. *Unes Law Review, Vol. 6 No. 3, Maret 2024*. <https://review.unes.com/index.php/law/article/view/1677/1385>.
- Mahadewi, I Gusti Agung Ika Laksmi, Ni Komang Tari Padmawati dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari. 2022. Notary in Indonesia: How Are State Fundamental Values Reflected in Law and Professional Ethics?. *Udayana Journal of Law and Culture*, Vol. 6, No. 2, Juli 2022. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2022.v06.i02.p05>.
- Mahardika, I Dewa Gede Wira dan Dewa Gde Rudy. 2023. Kepastian Hukum Penyerahan Protokol PPAT Kepada Penerima Protokol. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2024. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitatus/article/view/101678/51347>.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2015).
- Hetmina, Nicolas Erlich. 2018. Kedudukan Akta Ppat Yang Terlambat Di Daftarkan Di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Ketika Ppat Meninggal Dunia. *HUKUM BISNIS Universitas Narotama Surabaya*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2018. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1505010&val=17976&title=KEDUDUKAN%20AKTA%20PPAT%20YANG%20TERLAMBAT%20DI%20DAFTARKAN%20DI%20KANTOR%20PERTANAHAN%20KABUPATE%20NKOTA%20KETIKA%20PPAT%20MENINGGAL%20DUNIA>.

- Nola, Luthvi Febryka. 2016. Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juni 2016. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.949>.
- Nuridin dan Muhammad Wildan. 2020. Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2, November 2020. [10.24905/diktum.v8i2.91](https://doi.org/10.24905/diktum.v8i2.91).
- Oktavia, Rahma dan Sri Subekti. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perkara Pemblokiran Balik Nama Objek Hibah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/PDT/2021). *Jurnal Akta Notaris*, Vol. 2 No. 1, Juni 2023. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.900>.
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, dan Andina Elok Puri Maharani. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, Sovereignty : *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 2, Nomor 2, 2023*. <https://journal.uns.ac.id/index.php/Sovereignty/article/download/865/573/4531>.
- Purwaningsih, Endang. 2011. Penegakan Hukum jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka kepastian Hukum, *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 3 Desember 2011. endangpurwa.wordpress.com/2013/07/02/tulisan-pada-6/.
- Ratna, Laily dan Argo Satriyo Santoso. 2021. Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Milik atas Tanah Masyarakat Dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL). *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, Desember 2021. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jjhk/article/view/2498/1172>.
- Sari, R. M. P., Sidik Purnama dan Gunarto. 2018. Peranan PPAT Dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli. *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, Maret 2018. <https://www.neliti.com/id/publications/324960/peranan-ppat-dalam-pensertifikatan-tanah-akibat-jual-beli>.
- Saraswati, Made Putri, I Made Arya Utama dan Ida Bagus Agung Putra Santika. 2018. Kedudukan Hukum Akta PPAT Setelah Terbitnya Sertipikat Karena

- Peralihan Hak Atas Tanah. *Acta Comitas, Vol 3, No 1, April 2018*.
<https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p03>.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Siahaan, Mona Winata, Bismar Nasution dan Windha. 2013. Tinjauan Hukum Fungsi Yayasan Yang Didirikan Oleh Perseroan Terbatas, Transparency, *Jurnal Hukum Ekonomi Vol. II, No. 2, Juni 2013*.
<https://www.neliti.com/id/publications/14668/tinjauan-hukum-fungsi-yayasan-yang-didirikan-oleh-perseroan-terbatas>.
- Sukananda, Satria. 2018. Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia. *HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, Oktober 2018*.
<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/download/3924/2340>.
- Sulaiman, King Faisal. 2021. Polemik Fungsi Sosial Tanah dan Hak Menguasai Negara Pasca UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012, 2, *Jurnal Konstitusi, Vol. 18 No. 1, Maret 2021*.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Trisnawati, Melita dan Suteki. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah meninggal, *Notarius, Volume 12 Nomor 1 (2019)*. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23760>.
- Utama, Aulia Reza. 2016. Peranan Peradilan Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Badamai Law Journal, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017*.
<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/3391/2947>.
- Utami, Nadya Fitri. 2022. Akibat Hukum Pembatalan Akta Perubahan Yayasan Setelah Dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan Karena Cacat Prosedur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 303/PDT.P/2020/PN.JKT.TIM), *Indonesian Notary, Volume 4 Article 8, Maret 2022*. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1182&context=notary>.
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu dan Hendry Dwicahyo Wanda. 2017. Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum

Bersertifikat, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 24, Issue 3, Juli 2017.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7>.

Wahyuningrum, Dian Angraini dan Siti Malikhatun Badriyah. 2024. Perlindungan Hukum Untuk Pembeli Akibat Kelalaian PPAT Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah. *NOTARIUS*, Volume 17 Nomor 1, April 2024.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42068>.

Wibawa, K. C. S. 2019. Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid. *CREPIDO*, Vol 1 No. 1, Juli 2019. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.40-51>.

Website

Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Tengah. “Pelimpahan Wewenang Atribusi, Delegasi, dan Mandat” <https://kalteng.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/tahukahanda/Perbedaan%20Delegasi%20Mandat.pdf>.